

Lanjut Gratispol SMA Sampai S3, Rudy-Seno Resmi Pimpin Kalimantan Timur



SUMBER : TRIBUNKALTIM JUMAT, 21/02/2025

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah se-Indonesia pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Merdeka Jakarta. Sejak hari ini, Provinsi Kalimantan Timur resmi dipimpin Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan dalam masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Seno Aji, mereka akan mengayomi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Baik pendukung saat pemilihan kepala daerah maupun mereka yang bukan pendukung. "*Inshaallah*, lima tahun ke depan kita akan bersama-sama berkolaborasi, bahu membahu mewujudkan Kalimantan Timur Sukses dan Generasi Emas 2045." kata Gubernur Rudy Mas'ud usai pelantikan.

Hal penting yang ditegaskan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji adalah tentang program andalan mereka saat kampanye lalu, yakni Gratispol. Rudy menjelaskan rantai kemiskinan dan kebodohan hanya dapat diputus salah satunya dengan pendidikan. "Inti Program Gratispol, bahwa yang akan mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan itu adalah pendidikan. Maka pendidikan harus kita letakkan yang pertama," tegas Rudy.

Ia bersyukur, sebab ketika daerah lain seperti Papua rakyatnya masih menuntut pendidikan gratis, pihaknya sudah menyiapkan Program Gratispol untuk pendidikan gratis warga Kaltim mulai jenjang SMA/SMK, S1, S2 hingga S3.

Mantan legislator Senayan itu memastikan Program Gratispol ini akan segera dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur dalam era kepemimpinannya.

"Intinya, dalam lima tahun ke depan, kita harus berakselerasi melakukan lompatan-lompatan jauh karena Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara dan barometer nasional bahkan internasional," yakin Rudy.

"Kalimantan Timur minimal harus sejajar dengan Jakarta. Tapi kita juga ingin sejajar dengan Singapura, Brunei, Korea dan Jepang. Saya yakin bisa. *Manjadda wajadda*. Siapa bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil," tandasnya.

Wakil Gubernur Seno Aji menambahkan meski secara nasional Presiden Prabowo Subianto memang sedang melakukan program penghematan dan efisiensi. Tapi ia yakin hal itu tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Gratispol. "Jadi, jangan khawatir dengan adanya efisiensi yang sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi ini bukan krisis moneter," terang Seno Aji.

Dia yakin, pemerintahan nasional sedang menyisihkan anggaran untuk digunakan bagi peruntukan lain yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. "Kami sudah memastikan anggaran di Kalimantan Timur tercukupi dan hanya sebagian kecil kita bisa minimalisasi. Tetapi untuk program-program unggulan akan tetap kita lakukan dengan baik," tegas Seno.

Pelantikan dilakukan secara bersamaan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Ini merupakan sejarah baru, kepala daerah seluruh Indonesia dilantik secara bersama-sama dan langsung oleh Presiden RI. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan agar para kepala daerah memahami tugas mereka sebagai pelayan rakyat dan abdi masyarakat.

"Saudara adalah pelayan rakyat, abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup rakyat. Itulah tugas kita," pesan Presiden Prabowo.

Terlepas para pejabat berasal dari partai politik, agama dan suku yang berbeda, Presiden Prabowo minta agar tapi semuanya memiliki kesadaran sebagai satu Indonesia. "Marilah kita mengabdikan untuk rakyat kita dan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita," tutup Presiden. Saat pelantikan, tampak hadir juga mantan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik. **(sul/ky/adv)**

Sumber Berita :

1. Tribunkaltim, Lanjut Gratispol SMA Sampai S3, Rudy-Seno Resmi Pimpin Kalimantan Timur, 21/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah pendidikan.
2. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
3. Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:
 1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
 7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

